

**PERSEPSI MINAT MAHASISWA S1 AKUNTANSI TERHADAP KARIR  
DI BIDANG AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

*(Studi Empiris pada Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri di Kota  
Padang)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi FE UNP*



**Oleh:**

**SHARLY RAMAYANI**  
**NIM/BP: 14043082/2014**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSEPSI MINAT MAHASISWA S1 AKUNTANSI TERHADAP KARIR DI  
BIDANG AKUNTANSI PEMERINTAHAN

(Studi Empiris pada Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri di Kota Padang)

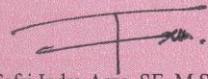
Nama : Sharly Ramayani  
NIM/TM : 14043082/2014  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2019

Disetujui Oleh :  
Pembimbing

  
Vita Fitria Sari, SE, M.Si  
NIP. 19870515 201012 2 009

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Jurusan  
Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Judul : Persepsi Minat Mahasiswa S1 Akuntansi terhadap Karir di Bidang  
Akuntansi Pemerintahan.

(Studi Empiris pada Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri  
di Kota Padang)

Nama : Sharly Ramayani

NIM/TM : 14043082/2014

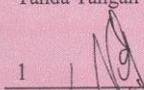
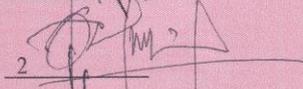
Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2019

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	
2.	Anggota	Halmawati, SE, M.Si	
3.	Anggota	Charoline Cheisviyanny, SE, MAk. Ak	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sharly Ramayani  
NIM/Tahun Masuk : 14043082 / 2014  
Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh / 31 Januari 1997  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan H. Rasul No. 4 Kel. Koto Baru Balai Janggo, Kec. Payakumbuh Utara, Payakumbuh  
No. HP/Telp : 082284364470/-  
Judul Skripsi : Persepsi Minat Mahasiswa S1 Akuntansi terhadap Karir di bidang Akuntansi Pemerintahan (Studi Empiris pada Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri di Kota Padang)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Februari 2019



Sharly Ramayani  
14043082

## ABSTRAK

**Sharly Ramayani, 14043082/2014, Persepsi Minat Mahasiswa S1 Akuntansi terhadap Karir di Bidang Akuntansi Pemerintahan (Studi Empiris pada Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri di Kota Padang)**

**Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai persepsi minat berkarir mahasiswa di bidang akuntansi pemerintahan antara mahasiswa akuntansi sebelum dan sesudah menyelesaikan mata kuliah akuntansi pemerintahan. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif-komparatif. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa S1 jurusan akuntansi universitas negeri di kota Padang. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi tahun masuk 2015 dengan asumsi sudah banyak memperoleh pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan dan mahasiswa akuntansi tahun masuk 2015 dengan asumsi belum terlalu mengenal akuntansi pemerintahan di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan uji beda.

Hasil dari penelitian ini didapatkan nilai signifikansi *2-tailed* adalah sebesar  $0,449 > 0,05$ . Berarti bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi minat berkarir yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti mata kuliah akuntansi pemerintahan.

**Kata kunci : akuntansi pemerintahan, akuntansi sektor publik, karir, pendidikan akuntansi pemerintahan, persepsi**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Persepsi Minat Mahasiswa S1 Akuntansi terhadap Karir di bidang Akuntansi Pemerintahan (Studi Empiris pada Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri di Kota Padang)**. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu dan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M.Si serta Para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Mia Angelina Setiawan, S.E, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
4. Kepada Dosen penguji Ibu Halmawati, SE, M.Si dan Ibu Charoline Cheisviyanny, Se, MAk. Ak yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini
5. Staf dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Teristimewa kepada kedua orangtua (Bapak Salman Kandis dan Ibu Maiyasmidar) dan kakak tercinta yang selalu memberikan perhatian, dukungan, semangat do'a dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Lisa Assari
9. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Akuntansi BP 2014 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk

kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Amin.

Padang, 2019

Sharly Ramayani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI, HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Teori Persepsi .....	11
1. Teori Pengharapan .....	14
2. Reformasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.....	18
3. Perkembangan Penelitian tentang Pengajaran Akuntansi Pemerintahan	25
4. Akuntabilitas.....	27
5. Karir .....	31
6. Minat.....	34
7. Pekerjaan di bidang Akuntansi Pemerintahan .....	39
B. Hipotesis dan Kerangka Konseptual .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Populasi dan Sampel.....	51
C. Jenis dan Sumber Data .....	52
D. Metode Pengumpulan Data .....	52
E. Instrumen Penelitian.....	53
F. Pengukuran Penelitian .....	54
G. Analisis Uji Coba Instrumen .....	55
H. Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	61
B. Demografi Responden .....	62
C. Deskripsi Hasil Kuesioner .....	64
D. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	65
E. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	67
F. Teknik Analisis Data .....	69
G. Pembahasan .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>7878</b>

A. Kesimpulan.....	778
B. Keterbatasan .....	778
C. Saran.....	79
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>811</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>8888</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perkembangan Hukum di Bidang Keuangan Negara atau di Indonesia .....	18
Tabel 2 : Skala Likert .....	53
Tabel 3 : Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .....	60
Tabel 4 : Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
Tabel 5 : Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Semester .....	62
Tabel 6 : Karakteristik Responden berdasarkan Perguruan Tinggi .....	62
Tabel 7 : Deskripsi Penilaian Responden terhadap Pekerjaan di bidang Pemerintahan .....	63
Tabel 8 : Hasil Uji Validitas .....	64
Tabel 9 : Hasil Uji Reliabilitas .....	66
Tabel 10 : Hasil Uji Normalitas .....	67
Tabel 11 : Uji Homogenitas .....	68
Tabel 12 : Statistik Deskriptif .....	69
Tabel 13 : Hasil Uji Beda .....	71
Tabel 14 : Responden yang Berminat Berkarir di bidang Akuntansi Pemerintahan .....	72
Tabel 15 : Pandangan Responden terhadap Akuntansi Pemerintahan .....	74
Tabel 16 : Profesi yang Paling Diminati di bidang Akuntansi Pemerintahan ....	76

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Kerangka Konseptual ..... 48

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian .....	88
Lampiran 2 : Tabulasi Penelitian Responden Mahasiswa S1 Akuntansi UNP dan UNAND tahun masuk 2015 dan 2016 .....	94
Lampiran 3 : Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian .....	146
Lampiran 4 : Uji Asumsi Klasik .....	151
Lampiran 5 : Analisis Deskriptif .....	152

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akuntansi merupakan salah satu jurusan di fakultas ekonomi yang banyak diminati saat ini (Sulistiani, 2012). Hasil penelitian Basuki (1999) disebutkan bahwa rata-rata mahasiswa memilih jurusan akuntansi didorong oleh keinginan mereka untuk menjadi profesional di bidang akuntansi, selain itu mereka juga termotivasi oleh anggapan bahwa profesi akuntan dimasa mendatang akan sangat dibutuhkan oleh banyak organisasi, perusahaan dan pemerintahan khususnya di Indonesia.

Akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi, sosial dan pemerintahan dalam menentukan laju perkembangan ekonomi karena informasi akuntansi dan opini dari seorang akuntan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang bersifat keuangan bagi pemakai laporan keuangan. Keadaan ini menjadikan akuntansi sebagai suatu profesi yang sangat dibutuhkan keberadaannya dalam lingkungan organisasi (Mulyadi, 2001).

Perekonomian yang terus tumbuh membuat potensi ekonomi Indonesia berkembang dan memerlukan peranan akuntan profesional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Akuntan dibutuhkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manajemen suatu entitas tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada banyak pihak yang memerlukan, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan

teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk menilai dan membandingkan suatu entitas lain sehingga tuntutan akan penyediaan informasi keuangan dan akuntansi semakin dibutuhkan (Fauzi, 2012).

Akuntansi dalam sektor publik berfungsi untuk mengontrol seluruh transaksi yang berhubungan dengan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, sedangkan bagi kepentingan negara akuntansi membantu pemerintah dengan penggunaan keuangan negara yang pada hakikatnya merupakan uang rakyat. Menghindari kesalahan pengambilan keputusan tersebut, salah satu cara yang ditempuh pemerintah dalam menggunakan benda-benda ekonomi adalah dengan mendasarkan semua keputusan ekonominya pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut membuat pemerintah lebih akurat dalam melaksanakan berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahannya terutama yang berhubungan dengan transaksi keuangan (Meliala, 2011).

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawabannya. Peraturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Mardiasmo, 2006).

Diberlakukannya peraturan tersebut menjadikan pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik perlu dilakukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai *good governance*. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik saat ini adalah semakin kuatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintahan pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara (Mardiasmo, 2006).

Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintahan melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, salah satunya berupa informasi laporan keuangan. Informasi dari laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan oleh masyarakat untuk melacak dari mana sumber-sumber pendapatan daerah diperoleh, bagaimana pengalokasian dana masyarakat tersebut dibelanjakan, siapa yang menerima manfaatnya, serta dengan cara apa pemerintah daerah menutup belanja dalam hal terjadi defisit serta dipergunakan untuk apa dana masyarakat itu dalam hal terjadi surplus (Halim 2007: 70).

Profesi akuntan saat ini dihadapkan dengan majunya perkembangan teknologi, tetapi profesi akuntan tidak akan tergantikan karena memerlukan analisis, memadukan data finansial dengan sosial serta memadukan data finansial dengan aspek legal yang hanya bisa dilakukan oleh akuntan. Potensi pekerjaan akuntan memiliki kebutuhan yang sangat

tinggi, seluruh instansi pemerintahan membutuhkan tenaga akuntan untuk mengelola laporan keuangan instansinya agar terhindar dari ketidakandalan. Sawarjuwono (2005) menyampaikan bahwa banyak sarjana akuntansi yang meniti karir pada sektor publik, yang didukung oleh kebutuhan akuntansi yang sangat tinggi di sektor ini. Kontribusi profesi pada sektor publik juga semakin penting untuk pengelolaan keuangan publik yang efektif, perbaikan pelayanan publik hingga tingkat kemakmuran suatu negara.

Reformasi telah mengubah peran tradisional akuntansi menjadi akuntansi yang lebih fokus pada akuntabilitas, hasil, pengukuran kinerja, efisiensi, ekonomis, dan produktif (Guthrie, 1995). Perubahan peran ini juga menyebabkan perubahan fokus Pendidikan Akuntansi Sektor Publik atau *Public Sector Accounting Education* (PSAE) untuk memastikan menghasilkan tenaga akuntan yang berpengetahuan dan kompeten untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pekerjaan dan berfungsi sebagai penggerak perubahan dalam organisasi melalui ketentuan informasi keuangan maupun non-keuangan yang diperlukan dalam perubahan ekonomi, sosial, keputusan politik dan untuk menunjukkan akuntabilitas kepada publik, sehingga dibutuhkan lulusan akuntansi yang memahami dan menguasai ilmu sektor publik.

Pembelajaran akuntansi di perguruan tinggi saat ini lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan sektor swasta dengan permintaan yang tinggi untuk lulusan yang terampil sehingga pendidikan akuntansi

untuk sektor publik menjadi terbatas (Engstrom, 1979). Faktanya dengan mengabaikan peran akuntan di sektor publik dapat merugikan lulusan ketika mencari pekerjaan sebab pekerjaan di instansi pemerintahan selalu dibutuhkan.

Akuntansi pemerintahan harus mempertanggungjawabkan pendapatan yang telah diterima dari masyarakat sehingga akuntansi pemerintahan mengenal yang namanya akuntansi untuk anggaran yang tidak terdapat pada entitas sektor swasta. Akuntansi pemerintahan juga harus mendahulukan aturan dari pada substansi kejadian. Akuntansi pemerintahan sangat penting untuk dipelajari dan dipahami agar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dapat disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kesadaran akan pentingnya ilmu akuntansi sektor publik, perguruan tinggi menjadikan akuntansi sektor publik masuk ke dalam kurikulum pendidikan dalam perkuliahan. Menurut Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP) tujuan diajarkannya mata kuliah akuntansi sektor publik adalah untuk memahami pentingnya pengelolaan sumber daya publik secara tepat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendidikan sektor publik diajarkan pada mata kuliah akuntansi sektor publik, manajemen keuangan daerah, dan akuntansi pemerintah yang diajarkan pada semester yang berbeda.

Menurut Suwarjuwono (2005) mahasiswa perlu dibekali pengetahuan dan keahlian yang cukup di bidang sektor publik, minimal

memahami karakteristik akuntansi sektor publik dan perbedaannya dengan akuntansi umum, memahami anggaran pemerintahan, masalah pengawasan, evaluasi kinerja pemerintahan dan pertanggungjawaban melalui laporan. Selain pemahaman teori, akuntansi juga dapat menyelenggarakan laboratorium akuntansi pemerintahan atau tur akademik ke daerah-daerah.

Reformasi akuntansi sektor publik menjadi langkah pertama dalam reformasi akuntansi pemerintahan dan itu dianggap sebagai syarat dan prasyarat penting bagi keberhasilan selanjutnya (Stamatiadis, 2009). Perubahan ini diikuti dengan kesuksesan reformasi dan semakin dibutuhkannya sumber daya manusia yang kompeten dan cakap termasuk akuntan untuk menjalankan pemerintahan.

Engstrom (1979) berpendapat bahwa keputusan perguruan tinggi untuk memperluas dan memperdalam ilmu akuntansi pemerintahan didasarkan pada permintaan lulusan akuntansi dengan pengetahuan sektor pemerintahan akan meningkat dalam waktu dekat karna akuntan akan dibutuhkan oleh semua tingkatan pemerintahan, rumah sakit, perguruan tinggi, sekolah umum dan organisasi nirlaba lainnya.

Penelitian yang dilakukan Martin (2017) menyampaikan bahwa pendidikan di jenjang perkuliahan akan mempengaruhi persepsi mahasiswa dalam menentukan karir. Respon mahasiswa terhadap materi pelajaran selalu tergantung pada hubungannya dengan pengajar dan kualitas bahan-bahan pembelajaran sehingga dengan mengenalkan

akuntansi pemerintah di perguruan tinggi dapat menambah minat mahasiswa untuk berkarir di bidang pemerintahan. Semakin mahasiswa mengerti dengan akuntansi pemerintah tentu akan semakin menumbuhkan minat untuk berkarir di bidang pemerintahan.

Savickas (2001) menjelaskan bahwa individu dikatakan matang atau siap untuk membuat keputusan karir jika pengetahuan yang dimilikinya untuk membuat keputusan karir didukung oleh informasi yang kuat mengenai suatu pekerjaan berdasarkan eksplorasi yang telah dilakukan. Banyak faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam memilih karir diantaranya adalah penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas (Rahayu, 2003).

Perencanaan karir merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan arah kesuksesan (Rasmini, 2007). Menurut Krech (2013) pilihan karir adalah usaha individu untuk mempersiapkan diri untuk memasuki karir yang berhubungan dengan pekerjaan melalui serangkaian proses kegiatan yang terarah dan sistematis, sehingga mampu memilih karir yang sesuai dengan yang diinginkan.

Penelitian ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Martin (2017) yang dilakukan di Amerika Serikat. Penelitian ini sama-sama ingin mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi terhadap berkarir di bidang akuntansi pemerintahan, apakah ada perbedaan persepsi antara mahasiswa yang belum menyelesaikan mata kuliah akuntansi

pemerintahan dengan mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah akuntansi pemerintahan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan periode waktu yang berbeda yaitu tahun 2018 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2015. Penelitian sebelumnya menggunakan analisis sensitivitas dengan melihat apakah jenis kelamin dan pengalaman kerja juga mempengaruhi persepsi mahasiswa atau tidak sedangkan penelitian ini tidak menghubungkan jenis kelamin dan pengalaman kerja dengan persepsi mahasiswa karena berdasarkan hasil penelitian Choirunisa (2017) jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi akuntan pemerintahan karena jumlah responden mahasiswa laki-laki dan perempuan berbeda jauh sehingga tidak mencerminkan perbandingan yang seimbang.

Penelitian sebelumnya juga menanyakan pilihan karir apa yang akan dikejar mahasiswa setelah lulus nanti dan ujian sertifikasi apa yang akan mereka ambil (CFE, CGFM, CIA, CMA, dan CPA), sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada profesi apa yang paling diminati mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi pemerintahan. Penelitian ini menyediakan beberapa pilihan profesi akuntan khusus untuk lembaga pemerintahan saja.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul penelitian **Persepsi Minat Mahasiswa Akuntansi terhadap Karir di Bidang**

**Akuntansi Pemerintahan (Studi Empiris pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi SI Universitas Negeri di Kota Padang).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti ini adalah :

1. Bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntansi di bidang pemerintahan?
2. Apakah terdapat perbedaan minat mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntansi pemerintahan sebelum dan sesudah menyelesaikan mata kuliah akuntansi pemerintahan?
3. Apakah profesi yang paling banyak diminati mahasiswa akuntansi di bidang akuntansi pemerintah?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntansi pemerintah.
2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan minat mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntansi pemerintahan sebelum dan sesudah menyelesaikan mata kuliah akuntansi pemerintahan.
3. Mengetahui profesi yang paling diminati mahasiswa akuntansi di bidang akuntansi pemerintahan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk banyak pihak, seperti :

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan persepsi minat mahasiswa akuntansi terhadap karir di bidang akuntansi pemerintahan dan untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh peneliti selama berada dibangku perkuliahan.
2. Bagi akademik, sebagai bahan penelitian dibidang analisis minat mahasiswa akuntansi menjadi akuntan publik dan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa.
3. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian yang lain.

## BAB II

### LANDASAN TEORI, HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Persepsi

Persepsi (*perception*) adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Proses persepsi dimulai dari diterimanya rangsangan (stimulus) oleh seseorang melalui alat penerimanya (panca indera), dilanjutkan ke pusat susunan syaraf yaitu otak, rangsangan tersebut kemudian diinterpretasikan sehingga individu mengerti dan menyadari apa yang diinderanya itu (Setiyani, 2008).

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Jadi persepsi dapat disimpulkan sebagai proses yang menyangkut masuknya pesan atau

informasi ke dalam otak manusia. Namun apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif.

Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sarwono (2008) mengemukakan bahwa persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulasi dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantuannya yang kemudian masuk ke dalam otak. Didalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang disebut persepsi. Winarta (2011) menyatakan bahwa persepsi dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) *External perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari luar individu.
- 2) *Self perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.

Menurut Robbins (1996) mengemukakan bahwa persepsi berkarir jika individu merasa organisasi atau lembaga tempatnya bekerja menyediakan peluang bagi dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhan tujuan karirnya maka individu yang bersangkutan akan membentuk persepsi yang positif mengenai pengembangan karirnya dalam organisasi

tersebut. Sebaliknya, jika individu merasa organisasi tempatnya bekerja kurang menyediakan peluang bagi dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan karirnya maka individu yang bersangkutan akan membentuk persepsi yang negatif mengenai pengembangan karirnya dalam organisasi tersebut.

Sejumlah faktor beroperasi untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Faktor-faktor ini bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat. Menurut Robbins karakteristik pribadi yang memengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu dan harapan-harapan seseorang. Oleh karena target tidak dilihat secara khusus hubungan sebuah target dengan latar belakangnya juga memengaruhi persepsi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan persepsi seseorang menurut Thoha (2010, 147-148) adalah :

- 1) Psikologi

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi.

- 2) Keluarga

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah keluarga. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini,

banyak sikap dan persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

### 3) Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini.

## 2. Teori Pengharapan

Teori dasar konsep pemilihan karir yang digunakan sebagai landasan teori adalah teori pengharapan (*expectancy theory*) yang berhubungan dengan teori motivasi. Motivasi berasal dari bahasa latin “*movere*” yang berarti dorongan atau menggerakkan. Berdasarkan hasil terjemahan bahasa Inggris (Echols dan Shadily, 1984) motivasi berasal dari “*motivation*” yang berarti dorongan atau rangsangan yang kata kerjanya adalah *to motivate*. Motivasi merupakan konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan individu untuk memulai dan mengerahkan perilakunya terhadap pekerjaan tertentu (Gibson et al, 1997).

Sedangkan menurut Robbins (2006) motivasi adalah proses yang ikut menentukan intensitas, arah dan ketekunan individu dalam usaha mencapai sasaran. Robbins menjelaskan definisi dari teori pengharapan adalah kekuatan dari kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan pengharapan bahwa tindakan itu tidak diikuti

oleh *output* tertentu dan tergantung pada daya tarik *output* tersebut bagi individu tersebut. Berikut adalah pernyataan dari teori ekspektasi :

- 1) Ketika individu berada diantara pilihan tingkah laku, maka individu akan memilih pilihan dengan kekuatan motivasi terbesar (*Motivation Forces*).
- 2) Kekuatan motivasi pada perilaku, tindakan atau tugas merupakan fungsi dari tiga persepsi antara lain :
  - a. *Expectancy*, merupakan suatu keyakinan dimana dengan berusaha dan mengerahkan individu untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik.
  - b. *Instrumentality*, merupakan suatu keyakinan dimana dengan berusaha lebih baik akan mengarahkan individu untuk mendapatkan imbalan yang diinginkan.
  - c. *Valance*, merupakan nilai dari imbalan yang diharapkan oleh individu.

Penjelasan yang paling diterima secara luas mengenai motivasi adalah teori pengharapan dari Vroom (1964) yang menyatakan motivasi terbentuk berdasarkan kebutuhan internal. Tiga asumsi pokok Vroom dari teori pengharapannya adalah :

- 1) Setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu akan memperoleh hal tertentu. Ini disebut sebuah harapan hasil (*outcome expectancy*) sebagai penilaian subjektif seseorang atas

kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut.

- 2) Setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu. Ini disebut valensi (*valence*) sebagai nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan.
- 3) Setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha (*effort expectancy*) sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Teori harapan memprediksi bahwa karyawan akan mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi apabila mereka merasa bahwa ada hubungan yang kuat antara upaya dan kinerja, kinerja dan imbalan, serta imbalan dan sasaran-sasaran pribadi. Setiap hubungan ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Robbins (2006) juga menjelaskan teori tersebut berfokus pada tiga hubungan, yaitu :

- 1) Hubungan upaya-kinerja

Probabilitas yang dipersepsikan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah upaya tertentu itu akan mendorong kinerja. Supaya usaha menghasilkan kinerja yang baik, individu harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja, dan sistem penilaiann kinerja yang mengukur inerja individu tersebut harus dipandang adil dan objektif.

## 2) Hubungan kinerja–imbalan

Sampai sejauh mana individu itu meyakini bahwa berkinerja pada tingkat tertentu akan mendorong tercapainya kinerja yang diinginkan. Hubungan akan menjadi kuat apabila individu merasa bahwa yang diberi penghargaan adalah kinerja (bukannya senioritas, alasan pribadi, atau kriteria lainnya).

## 3) Hubungan imbalan-sasaran pribadi

Sampai sejauh mana imbalan-imbalan organisasi memenuhi sasaran atau kebutuhan pribadi individu serta potensi daya tarik imbalan tersebut bagi individu tersebut. Motivasi akan tinggi sampai di tingkat mana penghargaan yang diterima seorang individu atas kinerja yang tinggi memenuhi kebutuhan-kebutuhan dominan yang konsisten dengan sasaran-sasaran pribadi.

Secara singkat, kunci dari teori pengharapan adalah pemahaman sasaran individu dan keterkaitan antara upaya dan kinerja, antara kinerja dan imbalan (Aprilyan, 2011). Oleh karena itu pemilihan karir mahasiswa akuntansi ditentukan oleh pengharapan akan karir yang mereka pilih, apakah karir tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan individu mereka dan apakah karir tersebut mempunyai daya tarik bagi mereka. Karir yang dipilih dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan dan memberikan daya tarik secara khusus kepada kebutuhan individu, serta karir tersebut mempunyai daya tarik bagi individu.

### **3. Reformasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia**

Akuntansi pemerintahan atau yang juga dikenal dengan istilah akuntansi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan buku yang ditulis Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial didalam masyarakat.

Di Indonesia sendiri akuntansi pemerintah telah ada sejak tahun 1959 dimana pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah.

Salah satu faktor pendukung perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia adalah adanya pengaruh reformasi 1998 dari krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 terhadap perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia yang memicu lahirnya konsep reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia secara total. Mahmudi (2006) menyebutkan bahwa perjalanan manajemen keuangan negara atau daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu :

- 1) Era sebelum otonomi daerah
- 2) Era transisi otonomi (reformasi tahap 1)
- 3) Era pascatransisi (reformasi tahap 2)

Perubahan dalam tiap fase ini jelas dalam perkembangan perundang-undangan keuangan negara / daerah, seperti pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Perkembangan Hukum di Bidang Keuangan Negara atau di Indonesia**

<b>Pra-otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 1999</b>	<b>Transisi Otonomi (Reformasi tahap 1)</b>	<b>Pascatransisi Otonomi (Reformasi tahap II)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 5 Tahun 1974</li> <li>• PP No. 5&amp;6 Tahun 1975</li> <li>• Manual Administrasi Keuangan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999</li> <li>• PP No. 105 Tahun 2000 dan PP No. 108 Tahun 2000</li> <li>• Kepmendagri 29 Tahun 2002</li> <li>• Peraturan Daerah</li> <li>• Keputusan KDH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 17 Tahun 2003</li> <li>• UU No. 1 Tahun 2004</li> <li>• UU No. 15 Tahun 2004</li> <li>• UU No. 32 Tahun 2004</li> <li>• UU No. 33 Tahun 2004</li> <li>• PP No. 24 Tahun 2005</li> <li>• Revisi PP No. 105 Tahun 2004</li> <li>• Revisi PP 108 Tahun 2000</li> <li>• Revisi Kepmendagri No. 29 Tahun 2002</li> </ul>

*Sumber : Mahmudi, Reformasi Keuangan Negara dan Daerah di Era Otonomi, Telaah Kritis Standar Akuntansi Pemerintahan, BPFE, 2006.*

Dampak dari adanya reformasi ini adalah :

- Perubahan orientasi politik
- Perubahan persepsi kebutuhan dasar
- Perubahan fokus area pengembangan
- Perubahan orientasi ekonomi
- Perubahan indikator kejujuran pemerintah

Dari 5 perubahan di atas kemudian secara tidak langsung berimbas pada perubahan pandangan masyarakat akan akuntansi sektor publik yaitu:

- Masyarakat menuntut sistem pemerintahan yang bersih (*Good Government*) dan penegakkan akuntabilitas publik di sekitar publik karena kerap kali menjadi sarang inefisiensi. Sarang pemborosan, sumber kebocoran dan institusi yang selalu merugi.
- Masyarakat menuntut akan kejujuran profesi akuntansi berupa kompetensi dan independensi
- Masyarakat menuntut kesejahteraan masyarakat (program pembangunan)

Akuntansi sektor publik terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik (Nordiawan, dkk, 2010: 6). Teknik-teknik berkembang mengikuti perkembangan organisasi pemerintahan, seperti adanya mazhab *New Publik Management* yang lebih menuntut pertanggungjawaban kinerja. Dalam konteks Indonesia, perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan di negara ini.

Reformasi di Indonesia juga memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan akuntansi sektor publik. Tuntutan agar pemerintah mengelola secara profesional dan efisien membuka kesadaran setiap orang terutama aparat pemerintah untuk senantiasa menanggapi tuntutan

lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan akuntabel.

Peraturan yang menyebabkan adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Perubahan mendasar tersebut adalah tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Salah satu pergeseran pengelolaan APBD berdasarkan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 serta aturan-aturan penerus atau penggantinya adalah timbulnya perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, lebih cepat mendorong perkembangan akuntansi sektor publik, tidak hanya pada pengembangan standar akuntansi yang lebih kaku tetapi juga pada pengembangan teknik dan sistem yang lebih andal. Pada organisasi (entitas) non profit, tuntutananya adalah untuk mempertanggungjawabkan atas penerimaan yang mereka terima dari masyarakat, apakah penerimaan-penerimaan (pendapatan) tersebut telah digunakan dengan tepat atau benar sesuai dengan yang digariskan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Pada organisasi pemerintahan yang diutamakan adalah pertanggungjawaban atas penerimaan dan penggunaan atas uang yang diterimanya dari masyarakat (Meliala, 2011: 19-21).

Mulai tahun 2005 laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 2005. Tahun 2010 dikeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual penuh.

Lebih spesifik, Simanjuntak menyebutkan beberapa faktor penting yang menjadi pendorong tumbuh pesatnya akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah :

- 1) Ditetapkannya tiga paket UU yang mengatur Keuangan Negara yakni Pasal 32 (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 2) Ditetapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pasal 184 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Profesi akuntansi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah lama menginginkan adanya standar akuntansi di sektor publik sebagai hal

yang paralel dengan telah adanya lebih dahulu standar akuntansi di sektor komersil.

- 4) Birokrasi. Pemerintahan merupakan penyusun dan sekaligus pemakai yang sangat berkepentingan akan adanya suatu akuntansi pemerintahan yang handal. Dengan dinudangkannya tiga paket keuangan negara maupun undang-undang yang terkait dengan pemerintahan daerah mendorong instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk secara serius menyiapkan sumber daya dalam pengembangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah.
- 5) Masyarakat (LSM dan wakil rakyat). Masyarakat melalui LSM dan wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD juga menaruh perhatian terhadap praktik *good governance* pada pemerintahan di Indonesia.
- 6) Sektor swasta. Perhatian dari sektor swasta mungkin tidak terlalu signifikan karena akuntansi pemerintahan tidak terlalu berdampak secara langsung atas kegiatan dari sektor swasta. Namun penggunaan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis akuntansi akan mendorong sebagian pelaku bisnis di sektor swasta untuk ikut menekuninya.
- 7) Akademisi. Akademisi terutama di sektor akuntansi menaruh perhatian yang cukup besar atas perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan. Perhatian ini sangat erat kaitannya dengan penyiapan SDM yang menguasai kemampuan di bidang akuntansi

pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional dan manajer akuntansi di pemerintahan.

- 8) Dunia Internasional (lender dan investor). World Bank, ADB, dan JBIC merupakan lembaga internasional (lender) yang ikut berkepentingan untuk berkembangnya akuntansi sektor publik yang baik di Indonesia. Perkembangan akuntansi tadi diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari proyek pembangunan yang didanai oleh lembaga tersebut.
- 9) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). UU No. 1 Tahun 2003 dan UU No. 15 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD diperiksa oleh BPK. Untuk dapat memberikan opininya, BPK memerlukan suatu standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum.
- 10) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. APIP yang meliputi Bawasda, Irjen, dan BPKP merupakan auditor intern pemerintah yang berperan untuk membantu pimpinan untuk terwujudnya sistem pengendalian intern yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah sekaligus mencegah praktik-praktik-praktik KKN. Akuntansi pemerintahan sangat erat kaitan dan dampaknya terhadap sistem pengendalian intern sehingga auditor intern mau tidak mau harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan sehingga dapat berperan untuk mendorong penerapan akuntansi pemerintahan yang sedang dikembangkan.

#### **4. Perkembangan Penelitian tentang Pengajaran Akuntansi Pemerintahan**

Reformasi akuntansi sektor publik juga membutuhkan perubahan pada fokus pendidikan sektor publik untuk memastikan terciptanya lulusan yang kompeten dan menguasai sektor publik khususnya akuntansi pemerintahan juga. Dalam dua dekade terakhir, banyak peneliti yang tertarik untuk memahami peran akuntansi dalam reformasi secara besar-besaran (Llewellyn, 1998). Akuntansi memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan perubahan organisasi dan perubahan tingkat mikro dan makro.

Beberapa studi telah dilakukan untuk meneliti pendidikan sektor publik meskipun kurangnya minat dalam pengajaran dan penelitian terkait hal ini. Holder (1978) melakukan penelitian terkait pendidikan akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat dan menemukan adanya keterbatasan pendidikan sektor publik ini di perguruan tinggi. Penyelidikan Holder menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi tidak menawarkan pendidikan akuntansi pemerintahan karena kurangnya sumber daya manusia, minat mahasiswa yang rendah, keterbatasan tenaga pengajar dan peluang karir yang rendah.

Beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat kemudian menanggapi hal ini dan berencana untuk menawarkan pendidikan akuntansi pemerintahan tersebut dalam waktu dekat. Engstrom (1979) melakukan penelitian serupa di Amerika Serikat dan menemukan beberapa

perguruan tinggi terakreditasi memperluas pendidikan ke bidang akuntansi pemerintahan tetapi tidak dapat dilakukan karena kurangnya dana dan tenaga pengajar yang berkualitas. Menurut Engstrom keputusan perguruan tinggi untuk memperluas pendidikan mencakup akuntansi pemerintahan disebabkan karena akan adanya peningkatan permintaan untuk lulusan akuntansi dengan pengetahuan sektor publik.

Sims et. Al. (1997) juga mempelajari permasalahan akuntansi pemerintahan di perguruan tinggi di Australia dan melaporkan bahwa sebagian besar lulusan akuntansi disana hanya mendapat sedikit saja ilmu terkait akuntansi pemerintahan. Sim menyarankan agar akuntansi pemerintahan sebaiknya dijadikan subjek pendidikan akuntansi utama. Satu dekade kemudian, Sims (1997) kembali melakukan penelitian pendidikan akuntansi pemerintah di perguruan tinggi Australia dan tidak menemukan adanya peningkatan yang signifikan dalam pendidikan akuntansi pemerintahan.

Setahun kemudian Sims kembali melakukan studi tentang rintangan dan peluang penerapan pendidikan akuntansi pemerintahan. Studi ini menegaskan lagi masih adanya keterbatasan pendidikan akuntansi pemerintah di Australia yang disebabkan oleh alasan yang sama dengan yang dikemukakan oleh Holder (1978).

Pendekatan dan sumber pengajaran akuntansi pemerintah juga menjadi perhatian beberapa peneliti. Lowensohn (2005) merekomendasikan penggunaan studi kasus yang menarik dan relevan

serta solusi yang disediakan untuk memberikan pandangan yang seimbang. Untuk menambah dan mempertahankan minat mahasiswa dibidang pendidikan akuntansi pemerintah, Murphy (2005) menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang aktif membantu mahasiswa untuk memahami terminologi dan teknik akuntansi yang unik. Sims (2007) juga melaporkan bahwa kuliah, ilustrasi dan buku pelajaran adalah pendekatan utama yang diperlukan dalam pengajaran akuntansi pemerintah.

Hoque (2002) menjelaskan bahwa penggunaan artikel atau jurnal untuk pembelajaran akuntansi pemerintah di perguruan tinggi sangat membantu. Hoque juga menyarankan artikel atau jurnal tersebut dijadikan pedoman atau acuan untuk belajar, terutama artikel-artikel internasional.

## **5. Akuntabilitas**

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan diminta mempertanggungjawabkan (Salim, 1991). Selanjutnya Mahmudi (2007:11) menjelaskan bahwa akuntabilitas finansial/keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

(Adisasmita, 2011:89). *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Pemikiran ini bersumber dari perkiraan administrasi publik yang merupakan isu menuju *clean goverment* atau pemerintah yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif, dari perspektif *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap :

- 1) Sumber daya finansial
- 2) Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijakan administrasi

- 3) Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
- 4) Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah :

- 1) *Probability and legality accountability*. Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).
- 2) *Process accountability*. Dalam hal ini digunakan proses, prosedur atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).
- 3) *Performance accountability*. Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).
- 4) *Program accountability*. Disini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).
- 5) *Policy accountability*. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi, yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintah demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua aktivitasnya kepada masyarakat.

Widodo (2001) menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi. Terdapat beberapa ciri pemerintahan yang *accountable* diantaranya sebagai berikut :

- 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
  - 2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
  - 3) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.
  - 4) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
  - 5) Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.
- Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo, 1999). Akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan.

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas manajerial merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen pemerintah daerah. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya.

## **6. Karir**

Karir adalah perkembangan dan kemajuan kehidupan pekerjaan, jabatan dan sebagainya, atau karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Dalam KBBI, karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang atau perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan seseorang. Karir lebih menekankan pada aspek dalam diri seseorang bahwa pandangan seseorang tersebut mengenai pekerjaannya merupakan perwujudan panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan serta mewarnai seluruh

gaya hidup (*life style*), tanpa mengesampingkan kedua aspek lainnya. Pekerjaan yang dimaksud merupakan pekerjaan yang mendapatkan imbalan dalam bentuk gaji (uang).

Pemilihan karir merupakan suatu cara atau usaha seseorang mengambil satu di antara banyak jabatan atau pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju dan sesuai dengan yang diinginkan. Karir bertujuan untuk mencapai posisi di masa yang akan datang dalam pekerjaan setiap individu. Keberhasilan karir tidak lagi diartikan sebagai penghargaan institusional dengan meningkatnya kedudukan dalam suatu hirarki formal. Kunci keberhasilan karir pada masa yang akan datang lebih dicerminkan dari pengalaman hidup seseorang daripada posisi yang dimilikinya.

Menurut Handoko (1996: 121) karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Karir seorang individu melibatkan rangkaian pilihan dari berbagai kesempatan (Gibson dkk., 1997: 305). Mereka mempertimbangkan ketertarikan, nilai dengan pilihan pekerjaan serta mencari informasi mengenai pekerjaan, karir dan jabatan. Menurut Chan (2012: 53) mahasiswa setelah lulus dapat memilih karir sebagai akuntan manajemen, akuntan pemerintahan, akuntan pendidikan, dan akuntan publik.

Penghargaan finansial merupakan pertimbangan pertama seorang mahasiswa dalam pemilihan karir yang akan dipilih sebagai akuntan. Pertimbangan dengan adanya kemampuan yang mereka miliki dalam melakukan pekerjaan, beratnya pekerjaan yang dilakukan, pertimbangan

pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh atau tujuan yang dimiliki merupakan alasan mahasiswa selektif dalam pemilihan karir sebagai akuntan.

Rahayu (2003) menunjukkan bahwa mahasiswa yang memilih karir sebagai akuntan perusahaan dan akuntan pemerintahan menganggap dengan karir tersebut gaji awal mereka tinggi, dibandingkan dengan mahasiswa yang memilih karir sebagai akuntan publik dan akuntan pendidik yang menganggap bahwa gaji awal dalam karir mereka tidak begitu tinggi.

Cukup banyak peluang karir yang bisa ditempuh oleh seorang lulusan akuntansi di lembaga pemerintahan, diantaranya :

- 1) Ditingkat pemerintah pusat, lulusan akuntansi bisa menempuh karir pada Inspektorat Jenderal (Irjen) yang ada di setiap departemen di Indonesia, selain itu bisa juga menjadi auditor pada BPK atau BPKP.
- 2) Ditingkat pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, lulusan akuntansi bisa menempuh daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, lulusan akuntansi bisa menempuh karir sebagai auditor di Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), bisa juga menjadi akuntan di setiap unit kerja Pemda, karena saat ini setiap unit kerja Pemda karena saat ini setiap unit kerja di Pemda diwajibkan menyelenggarakan pengakuntansian sendiri.

- 3) Menjadi pengajar atau instruktur pada diklat-diklat yang diselenggarakan pemerintah, pada kalangan pemerintah profesi ini dikenal dengan istilah widyaiswara.
- 4) Pekerjaan lainnya yang membutuhkan skill seorang sarjana akuntansi. Lembaga pemerintahan memiliki banyak kecambangan tugas yang membutuhkan seorang sarjana akuntansi terlibat didalamnya, sehingga sampai saat ini kebutuhan tersebut belum dapat terpenuhi semua.

Banyaknya peluang karir bagi sarjana akuntansi di lembaga pemerintahan tentu saja harus dipandang sebagai peluang, baik oleh para penyelenggara pendidikan tinggi maupun oleh para mahasiswa untuk mengisi peluang tersebut.

## **7. Minat**

Menurut Suryobroto (1998: 109) minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu objek. Timbulnya minat terhadap suatu objek ini ditandai dengan adanya rasa senang atau tertarik. Menurut Muhammadiyah (2009) minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan. Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Minat dapat menyebabkan seseorang lebih giat menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya.

Menurut Syah (2011: 152) minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.

Indikator yang terdapat adalah pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan. Menurutnya, minat tidak termasuk istilah populer dalam psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada aspek internal lainnya, seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan. Maka dari itu, indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pemusatan perhatian

Slameto (2010: 41) menyampaikan pemusatan perhatian itu sendiri diwujudkan dengan adanya :

- (a) Mobilitas tujuan, yaitu pemusatan perhatian harus mencakup tentang segala hal yang menimbulkan perasaan bahwa mahasiswa akan mendapat sesuatu dari apa yang di minatnya,
- (b) Memberi bentuk pada belajar, yaitu menggabungkan segala bentuk pelajaran yang terstruktur untuk mencapai minat,
- (c) Mengorganisasi belajar sebagai suatu proses eksplorasi dan penemuan, pemusatan perhatian dapat menimbulkan suatu pertanyaan yang perlu dijawab artinya mahasiswa harus selalu belajar melalui penemuan.

2) Keingintahuan

Slameto (2010: 147) mengungkapkan bahwa keingintahuan dapat diwujudkan dalam cara berfikir yang fleksibel, memiliki semangat bertanya, banyak membaca, terbuka terhadap pengalaman baru, dan cenderung tidak mudah puas akan suatu jawaban.

### 3) Motivasi

Rivai (2013) menjelaskan bahwa beberapa aspek yang memotivasi seseorang untuk menjalankan suatu profesi atau pekerjaan yaitu rasa aman dalam bekerja, mendapat gaji yang adil dan kompetitif, lingkungan kerja yang menyenangkan, penghargaan atau prestasi kerja, dan perlakuan yang adil dari manajemen.

### 4) Kebutuhan

Menurut teori kebutuhan Herzberg's oleh Hasibuan (2012: 157) kebutuhan dapat dilihat dari kebutuhan pemeliharaan jasmaniah, yaitu kebutuhan akan kesehatan dan kebutuhan pemeliharaan psikologis, yaitu faktor-faktor pemeliharaan menyangkut kebutuhan psikologis seseorang.

Minat adalah aspek individu, yaitu berhubungan dengan kesiapan mental, juga dipandang bahwa minat merupakan suatu keadaan individu yang mempunyai peranan yang erat hubungannya dengan kebutuhan. Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu apa yang dilihat seseorang tentu akan membangkitkan minatnya, sejauh yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri.

Bernanrd (2008) mengatakan bahwa minat tidak timbul secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja. Minat juga dihubungkan

dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi seseorang, apa yang dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri.

Minat adalah hal penting yang akan menuntun aktivitas dimasa yang akan datang. Krapp (1996) membagi definisi minat secara umum menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1) Minat Pribadi

Merupakan karakteristik kepribadian seseorang yang relatif stabil, yang cenderung menetap pada diri seseorang. Minat pribadi biasanya dapat membawa seseorang pada beberapa aktivitas atau topik yang spesifik. Minat pribadi dapat dilihat ketika seseorang menjadikan sebuah aktivitas atau topik sebagai pilihan untuk hal yang pasti, secara umum menyukai topik atau aktivitas tersebut, serta topik atau aktivitas yang dijalani memiliki arti penting bagi seseorang tersebut.

2) Minat Situasi

Merupakan minat yang sebagian besar dibangkitkan oleh kondisi lingkungan.

3) Minat dalam Ciri Psikologi

Merupakan interaksi dari minat pribadi seseorang dengan ciri-ciri lingkungan. Renninger menjelaskan bahwa minat pada defisit ini tidak hanya karena seseorang lebih menyukai sebuah aktivitas atau topik, tetapi karena aktivitas atau topik tersebut

memiliki nilai tinggi dan mengetahui lebih banyak mengenai topik atau aktivitas tersebut.

Menurut Surya (1985: 72) faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah:

- 1) Faktor dari dalam (internal)
  - a. Faktor fisiologi atau jasmani individu, yang bersifat bawaan, seperti penglihatan, pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya
  - b. Faktor psikologi, baik yang bersifat bawaan ataupun herediter yang terdiri atas faktor intelektual dan faktor non intelektual.
- 2) Faktor dari luar (eksternal)
  - a. Faktor sosial, yang terdiri atas faktor lingkungan keluarga
  - b. Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan dan sebagainya
  - c. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar dan sebagainya
  - d. Faktor spiritual dan lingkungan keagamaan.

Minat berkarir adalah suatu pemusatan yang tidak disengaja yang terlahir dari dalam diri individu untuk mengerti individu dan menuntun aktivitas dimasa yang akan datang. Minat berkarir di dalam bidang pemerintahan banyak dibutuhkan karena pemerintahan Indonesia telah memperketat penerapan. Minat berkarir suatu status atau jenjang pekerjaan atau jabatan seseorang dijadikan sebagai sumber nafkah, apakah itu sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan.

Seseorang yang berminat terhadap suatu objek sudah tentu ada unsur motivasi didalamnya, motivasi seseorang akan memberikan dorongan untuk mencapai terhadap apa yang dia minati demi memenuhi kebutuhannya. Seseorang yang mempunyai minat pada suatu obyek, dalam hal ini ialah menjadi akuntan pemerintahan. Minat pada suatu obyek akan mendorong seseorang untuk mencari tahu dan mempelajari obyek tersebut dan dia akan mengikuti aktivitas yang berhubungan dengan obyek tersebut.

#### **8. Pekerjaan di bidang Akuntansi Pemerintahan**

Menjadi karyawan pemerintahan lebih dipilih dibanding berwirausaha bagi masyarakat Indonesia. Rendahnya tingkat wirausaha di Indonesia tergambar dari antrean panjang pelamar untuk lowongan kerja sektor pemerintahan, padahal jumlah lowongannya relatif terbatas. Tingkat kewirausahaan Indonesia hanya 1,56% dari penduduk total (Halim, 2012). Lowongan pekerjaan di bidang pemerintahan lebih diburu setelah lulus kuliah.

Menurut Mangunwijaya pendidikan di Indonesia melahirkan minat untuk menjadi pegawai pemerintahan karena masih mewarisi mental inlander dari zaman penjajahan dulu, dimana kolonial Belanda mendidik orang supaya patuh dan taat pada pemerintah agar bisa menjadi *ambtenaar* (pegawai pemerintah zaman kolonial) yang merupakan jabatan terhormat kala itu. Hingga sekarang menjadi pegawai pemerintah atau yang biasa dikenal Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi profesi yang diminati.

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 yang disebut sebagai PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS bertugas menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Para lulusan akuntansi yang bekerja di bidang pemerintahan melalui seleksi penerimaan pegawai negeri sipil nantinya juga akan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bagi sebagian besar penduduk Indonesia, menjadi PNS adalah sebuah dambaan, meskipun bagi sebagian lainnya merupakan keengganan. PNS dikatakan menjadi dambaan karena setiap tahunnya selalu ada antrean pengambilan formulir CPNS yang semakin banyak (Wahono, 206, h.4).

Menurut Hauri (2017) bekerja sebagai abdi negara juga membuat PNS mendapat kelebihan lainnya, seperti :

- 1) Jaminan gaji

Meski penghasilan PNS tidak sebesar penghasilan bekerja di swasta, para PNS cukup merasa tenang karena gaji mereka akan naik dua tahun sekali (gaji berkala). Tentunya kenaikan gaji ini juga harus diimbangi dengan meningkatkan kinerja di instansinya. Gaji pokok PNS ditentukan sesuai dengan golongan dan masa

kerja, kemudian PNS juga akan mendapat tunjangan-tunjangan lainnya.

2) Jaminan dana pensiun

Setelah masa kerja berakhir, PNS akan menerima dana pensiun. Jadi penghasilan pensiunan PNS akan tetap terjamin baik saat masih bekerja maupun saat pensiun (Desangkuni, 2006).

3) Tidak adanya PHK

Bila banyak karyawan swasta menjadi korban PKH (Pemutusan Hubungan Kerja) karena perusahaan bangkrut atau karena kinerja karyawan yang buruk, PNS lebih aman karena tidak akan ada PHK kecuali melakukan kejahatan berat.

4) Mendapat akses

Setelah resmi menjadi PNS, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan semakin terbuka lebar dengan biaya pemerintah. Ada banyak beasiswa bagi PNS untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya harus memperoleh izin dari atasan.

5) Adanya jenjang karir

Jenjang karir PNS disesuaikan dengan pangkat dan golongan. Pada dasarnya setiap empat tahun PNS akan naik golongan dan menduduki jabatan struktural atau fungsional. Bagi yang cepat menyesuaikan diri dan pekerja keras tentu karirnya akan lebih cepat melesat. Jadi berprofesi sebagai PNS tidak monoton,

dengan naiknya pangkat tentu tunjangan yang diterima juga lebih besar.

6) Mendapat banyak tunjangan

Meskipun gaji pokok PNS tidak terlalu besar, tapi para PNS mendapat banyak tunjangan setiap bulannya. Tunjangan tersebut terdiri dari tunjangan beras, tunjangan anak istri, tunjangan kesehatan, dan lain-lain. Pada beberapa instansi seperti kepolisian, pertanian, dan keuangan akan mendapat remunerasi yang jumlahnya tidak sedikit. Khusus guru akan mendapat uang sertifikasi.

7) Adanya gaji ke-13 dan gaji ke-14

Tidak hanya dua belas kali, PNS akan menerima gaji selama 14 kali dalam setahun. Gaji ke-13 biasanya akan cair pada bulan Juli setiap tahunnya, sementara gaji ke-14 akan cair pada hari raya Idul Fitri.

8) Punya banyak waktu luang

Berprofesi sebagai PNS akan memiliki banyak waktu luang sebab jam kerja PNS tidak seharian penuh atau tidak sepadat bekerja di swasta. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah adalah 37 jam 30 menit per minggu, baik untuk 5 hari kerja maupun 6 hari kerja sesuai ketentuan Kepala Daerah masing-masing.

Luangnya waktu ini bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk lebih kreatif memanfaatkan waktu dengan memiliki pekerjaan lain seperti membuka usaha.

#### 9) Prestise

Menjadi PNS adalah kebanggaan diri sendiri dan keluarga sebab telah terpilih setelah bersaing dengan banyak orang. Di masyarakat Indonesia berprofesi sebagai PNS cukup dipandang dan dihargai.

Seperti yang telah diuraikan, pekerjaan di bidang pemerintahan saat ini banyak di minati karena adanya jaminan keamanan, maksudnya gaji yang diterima jelas setiap bulannya dan adanya tunjangan pensiun untuk hari tua. Untuk besarnya gaji yang diterima PNS mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kenaikan Gaji PNS Tahun 2015, dijelaskan besaran gaji tergantung golongan dan masa kerja golongan, yang membedakan hanyalah tunjangan yang diberikan oleh masing-masing instansi.

Pekerjaan di bidang akuntansi memiliki asumsi *going concern* untuk kelangsungan hidupnya. *Going concern* adalah suatu keadaan demi kelangsungan hidup suatu badan usaha untuk dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu ke depan, dimana hal ini dapat dipengaruhi oleh keadaan finansial maupun non finansial. Di banding organisasi swasta, berkarir di bidang pemerintahan dirasa lebih aman karena tidak adanya kekhawatiran

akan mengalami kerugian yang akan menyebabkan pemutusan hak kerja pegawai, instansi pemerintah akan tetap bekerja sebagaimana mestinya.

Perkembangan profesi akuntansi sukses berkompetisi dengan konsultan manajemen. Tanpa mengubah karakter inti disiplin akuntansi, manfaat akuntansi telah berkembang dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Ini berarti fungsi akuntansi dalam pelaporan keuangan akan semakin penting.

Pekerjaan di bidang akuntansi pemerintahan saat ini semakin diminati karena adanya tuntutan akuntabilitas yang tinggi sehingga menuntut para akuntan pemerintah untuk dapat bekerja secara lebih profesional dan akuntabel. Untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang benar adanya tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang memang kompeten di bidangnya, hampir setiap penerimaan pegawai negeri membuka lowongan pekerjaan bagi lulusan S1 Akuntansi. Dengan adanya tuntutan yang tinggi tersebut, tentunya pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak pula untuk mewujudkan transparansi.

Banyak profesi yang bisa ditekuni oleh lulusan akuntansi untuk bekerja di instansi pemerintahan. Diantaranya lulusan akuntansi dapat bekerja sebagai tenaga pendidik, auditor, akuntan pajak, analis, dll. Menjadi tenaga pendidik misalnya lulusan akuntansi dapat bekerja menjadi seorang guru atau dosen yang berstatus PNS. Banyaknya perkembangan dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong akuntan pendidik untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam bidang pengajaran.

Selain itu lulusan akuntansi juga dibutuhkan bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pengawas terhadap pengelolaan keuangan negara atau bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengawas keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lulusan akuntansi juga dapat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ataupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mana pegawai instansi tersebut terkenal memiliki gaji yang tinggi.

Tidak hanya itu, lulusan akuntansi juga dapat bekerja di instansi pemerintahan lainnya karena setiap instansi membutuhkan tenaga akuntansi untuk menyusun laporan keuangannya dengan profesi yang beragam seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerja Umum, Dinas Kesehatan, dll.

## **B. Hipotesis dan Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi minat mahasiswa akuntansi terhadap karir di bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi memegang peranan penting dalam dunia ekonomi, semua lini perusahaan ataupun pemerintahan membutuhkan tenaga akuntan untuk mengelola keuangannya. Setelah era reformasi dan adanya hak setiap daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyajian informasi dari pemerintah semakin tinggi, apalagi

sudah diatur oleh standar penyajian laporan keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan tujuan akuntansi sektor publik yaitu untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kepentingan publik umumnya terkait dengan politik dan pemerintahan. Hal ini yang membawa pengertian sektor publik lebih banyak difokuskan pada pemerintah (Jones dan Pendlebury, 2000). Sektor publik adalah manajemen keuangan yang berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang terkait dengan lembaga pemerintahan.

Pendidikan akuntansi sektor publik di perguruan tinggi masih terbilang sedikit dibanding akuntansi komersial, tetapi saat ini setiap jurusan akuntansi di universitas-universitas Indonesia telah dibekali dengan ilmu pendidikan sektor publik. Pendidikan tentang sektor publik ini dirasa perlu karena di instansi pemerintahan sangat dibutuhkan tenaga-tenaga akuntan profesional untuk membantu pemerintah dalam menyusun laporan keuangannya dan menyajikannya secara handal.

Mata kuliah sektor publik diajarkan pada tingkat yang berbeda sehingga akan membuat persepsi mahasiswa memandang akuntansi pemerintahan dengan cara yang berbeda pula. Persepsi mahasiswa yang telah belajar sektor publik tentunya berbeda dengan mereka yang belum mempelajarinya, hal ini disebabkan karena pemahaman yang berbeda pula. Setelah mengambil mata kuliah sektor publik tentunya mereka akan lebih

paham bagaimana akuntansi di sektor publik tersebut dan perbedaannya dengan akuntansi sektor bisnis.

Berkarir di bidang pemerintahan dapat menjadi pilihan bagi lulusan akuntansi sebab saat ini dibutuhkan banyak tenaga akuntansi untuk bekerja di instansi pemerintah. Sebagian memandang profesi akuntan pemerintah lebih aman dibanding bekerja sebagai akuntan swasta atau perusahaan. Adanya jaminan keamanan finansial, tekanan kerja yang tidak setinggi bekerja di swasta, jaminan masa tua dan beberapa faktor lainnya membuat banyak orang memilih untuk bekerja sebagai akuntan pemerintah.

Sehingga setelah mempelajari akuntansi pemerintah, tentu pandangan mahasiswa terhadap akuntansi pemerintahan telah berbeda, mereka akan mampu menentukan apakah mereka tertarik untuk berkarir di bidang pemerintahan atau justru sebaliknya.

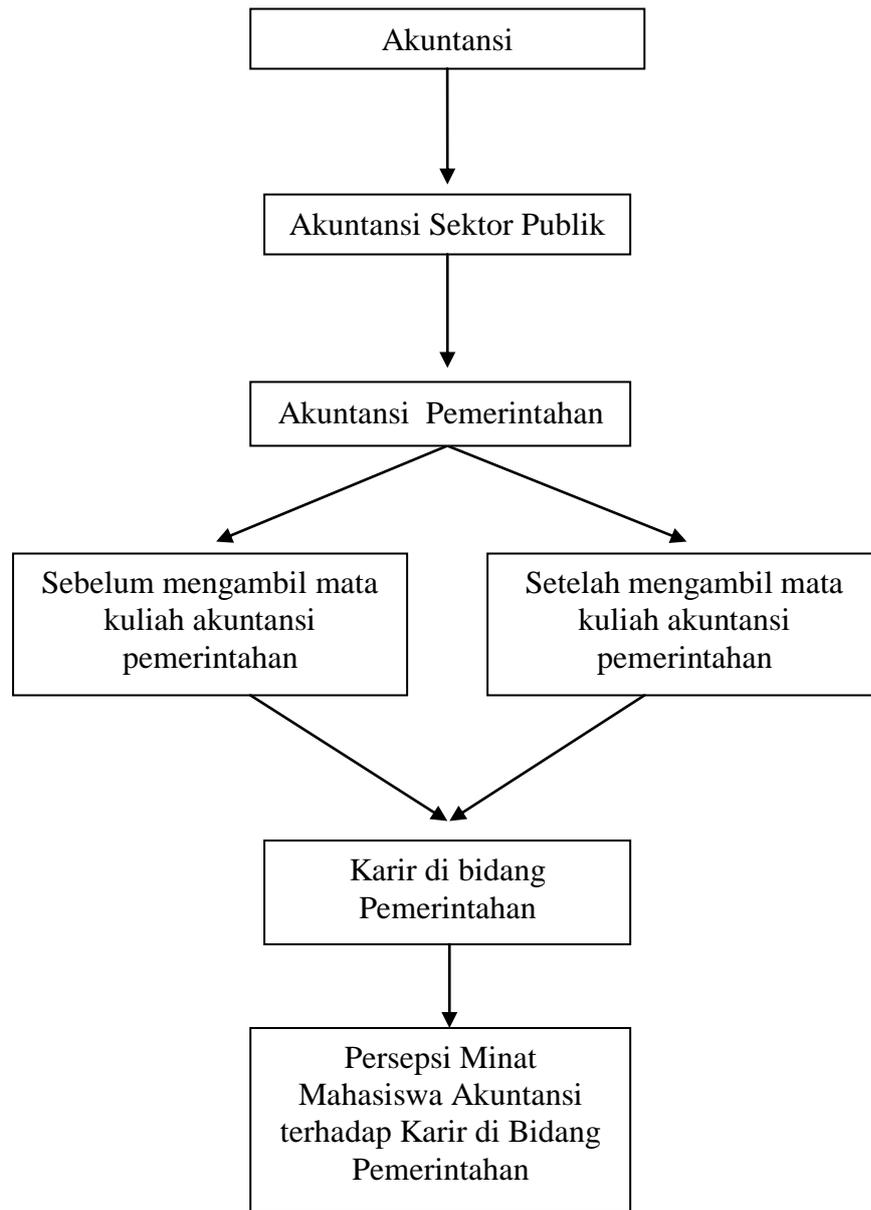
Penelitian yang dilakukan oleh Martin (2017) menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelajaran akuntansi pemerintahan, mahasiswa mulai melihat karir di bidang akuntansi pemerintahan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Minat mahasiswa mulai meningkat untuk berkarir di bidang pemerintahan karena menawarkan manfaat moneter dan non-moneter, keamanan kerja dan profesi yang dinamis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hipotesis untuk penelitian ini adalah :

Ho : Tidak terdapat perbedaan persepsi minat berkarir di bidang akuntansi pemerintahan antara mahasiswa akuntansi sebelum dan sesudah menyelesaikan mata kuliah akuntansi pemerintahan.

Ha : Terdapat perbedaan persepsi minat berkarir di bidang akuntansi pemerintahan antara mahasiswa akuntansi sebelum dan sesudah menyelesaikan mata kuliah akuntansi pemerintah.

Dari hipotesis tersebut, maka kerangka konseptual untuk penelitian ini adalah :



**Gambar I Kerangka Konseptual**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Responden berminat untuk berkarir di bidang akuntansi pemerintahan karena adanya anggapan bahwa dengan bekerja di bidang pemerintahan akan memiliki potensi penghasilan awal yang tinggi, keamanan finansial, memiliki potensi penghasilan untuk jangka panjang yang cukup tinggi, fleksibilitas dalam masalah keseimbangan kehidupan kerja dan adanya keamanan kerja.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai minat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi pemerintahan antara sebelum dengan sesudah diselesaikannya mata kuliah akuntansi pemerintahan, responden sama-sama berminat.
3. Profesi yang paling diminati mahasiswa S1 akuntansi jika berkarir di bidang akuntansi pemerintahan adalah sebagai auditor internal dan akuntan pajak dan auditor eksternal.

#### **B. Keterbatasan**

Peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam

penelitian ini yang masih perlu direvisi bagi penelitian selanjutnya, yaitu antara lain :

1. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa S1 akuntansi UNP dan UNAND sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi untuk universitas lain.
2. Responden penelitian adalah mahasiswa S1 akuntansi dengan tahun masuk 2015 dan 2016 dengan asumsi mahasiswa tahun masuk 2016 telah menerima sedikit gambaran mengenai akuntansi pemerintahan sebelumnya dari mata kuliah lain misalnya seperti mata kuliah akuntansi sektor publik sehingga tidak terlihat jelas adanya perbedaan.
3. Masih dangkalnya pengetahuan responden terkait akuntansi pemerintahan sehingga saat pengisian kuesioner bagian padanan kata, jawaban responden tidak terlalu menggambarkan bagaimana akuntansi pemerintahan yang mereka ketahui, rata-rata responden hanya memilih netral diperkirakan karena responden kurang paham.
4. Sedikitnya penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan yang sama sehingga cukup sulit untuk menemukan referensi yang mendukung penelitian ini.

### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian pada universitas-universitas lain baik negeri maupun swasta agar hasil yang

diperoleh lebih berkualitas dan menambah kategori universitas yang akan dijadikan sampel penelitian.

2. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian pada mahasiswa yang baru masuk dengan asumsi belum mengenal akuntansi pemerintahan sama sekali.